

**PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG
ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD): KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL
MODERATING
(Study Empiris pada Kabupaten Sragen)**



NASKAH PUBLIKASI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

IKA KINASIH

B 200 080 169

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2013

HALAMAN PENGESAHAN
NASKAH PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca Artikel Publikasi Ilmiah dengan judul:

PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD): KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING

(Study Empiris pada DPRD Kabupaten Sragen).


Yang ditulis oleh

IKA KINASIH
B 200 080 169

Penandatanganan berpendapat bahwa Artikel Publikasi Ilmiah tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Mei 2013

Pembimbing Utama


(Drs. Eko Sugiyanto, M.si)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Dr. H. Triyono S.E., M.Si)

**PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG
ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD): KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL
MODERATING**

(Study Empiris pada Kabupaten Sragen)

IKA KINASIH

B 200 080 169

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan mengetahui sejauh mana komitmen organisasi mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan dewan tentang anggaran. Variabel dependennya adalah pengawasan dewan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Variabel moderating dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi.

Penelitian ini adalah penelitian dengan metode survey. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (*Adjusted R²*). Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kota Sragen. Sementara sampel penelitian adalah 45 anggota DPRD Kota Sragen dengan teknik pengambilan sampel yaitu *sampling jenuh*.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4,191 dan p-value sebesar 0,000. Karena nilai $p < 0,05$, maka H_1 diterima artinya pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan dewan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah DPRD Kabupaten Sragen. Pengujian hipotesis kedua (H_2) pengaruh komitmen organisasi terhadap pengawasan dewan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,929 dan p-value sebesar 0,061. Karena nilai $P > 0,05$, maka H_2 tidak diterima artinya komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan dewan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pengujian hipotesis kedua (H_3) pengaruh komitmen organisasi terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan dewan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Berdasarkan hasil

perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} untuk interaksi PDTA*KO sebesar -2,131 dan p-value sebesar 0,039. Karena $p < 0,05$, maka H_3 diterima pada taraf signifikansi 5%; artinya komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan dewan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DPRD Kabupaten Sragen.

Kata kunci: **pengetahuan, pengawasan, komitmen organisasi, APBD.**

A. PENDAHULUAN

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit. Hal tersebut berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan.

Reformasi telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Salah satu agenda reformasi yaitu adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. UU No. 32 dan 33 tahun 2004 merupakan tonggak awal pelaksanaan otonomi daerah dan proses awal terjadinya reformasi penganggaran keuangan daerah di Indonesia.

Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah, pasal 132, menyatakan DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Pengawasan tersebut bukan berarti pemeriksaan, tetapi lebih mengarah pada pengawasan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Menurut PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran menjelaskan bahwa: 1) pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, 2) Dewan berwenang memerintahkan pemeriksaan eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran.

Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Pramono, 2002 dalam Rosseptalia, 2006). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan oleh dewan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah komitmen organisasi.

Kinerja dewan dalam menjalankan fungsi legislatifnya selalu menjadi perhatian khusus masyarakat karena dipercayakannya amanah pada anggota dewan untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi, kepercayaan tersebut sekarang ini cenderung berkurang bahkan banyak yang tidak mempercayai kinerja dewan, hal ini disebabkan karena

kinerja dewan yang kurang optimal dan belum ada komitmen organisasi yang kuat dari para anggota dewan.

B. LANDASAN TEORI

Keuangan daerah (APBD)

Menurut pasal 1 ayat (5) pp. 58 tahun 2005, pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Menurut UU No. 33 tahun 2004 Pasal 1 ayat (17), APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penganggaran sektor publik merupakan proses perencanaan yang tidak dapat dipisahkan dengan politik. Anggaran merupakan hasil negosiasi, yang artinya bahwa dalam penyusunannya terdapat pertimbangan akan tujuan eksekutif dan tujuan legislatif sebagai perantara tujuan masyarakat (Mardiasmo, 2002). Menurut Mardiasmo (2002) tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penyusunan anggaran sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan dan penyusun anggaran (*Budget Preparation*)
2. Tahap ratifikasi (*approval/ ratification*)

3. Tahap Pelaksanaan Anggaran(*Budget implementation*)
4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran

Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Arifin (2006) pengawasan adalah suatu rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap suatu kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menjamin agar semua kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebuah pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien oleh organisasi. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Pengetahuan dewan tentang anggaran

Pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa, dan berfikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak Indriantoro dan Supomo (1999) dalam Werimon

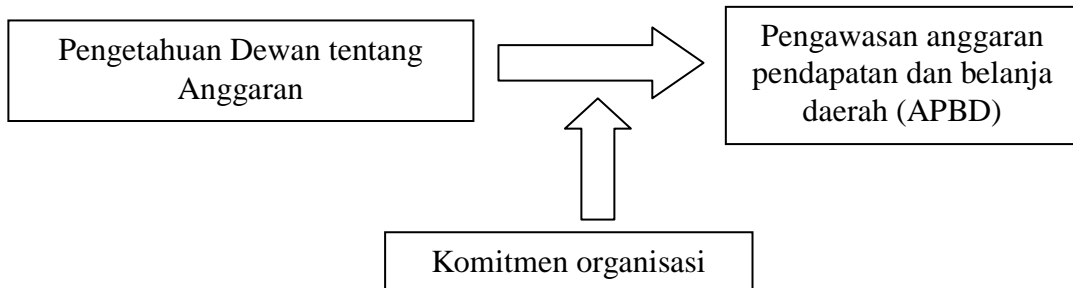
(2005). Pengetahuan erat kaitannya dengan pendidikan dan pengalaman. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat (Truman dalam Utomo, 2011). Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota dewan selaku perwakilan masyarakat di parlemen, kapasitas dan kemampuan anggota dewan sangat diperlukan untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang berkualitas.

Komitmen organisasi

Pengertian organisasi adalah yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan. Wiener dalam Amelia Veronika (2008) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai dorongan diri individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi. Komitmen ini bisa tumbuh disebabkan karena individu memiliki ikatan emosional dengan organisasi yang meliputi dukungan moral dan menerima nilai yang ada di dalam organisasi serta tekad dan dalam organisasi untuk mengabdikan kepada organisasi ataupun keinginan untuk mempertahankan keanggotaan di dalam organisasi.

Kerangka Teoritis

Kerangka teori dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan kerangka teoritis diatas dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

- H₁: pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).**
- H₂ :Komitmen organisasi berpengaruh terhadap pengawasan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)**
- H₃ : Komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).**

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dengan metode survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok. Daftar pertanyaan (kuesioner) dalam penelitian ini menggunakan kuesioner penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003), kemudian peneliti kembangkan lagi disesuaikan dengan situasi dan teori terkait.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD kota Sragen. Sampel dalam penelitian ini adalah anggota dewan di DPRD kabupaten

Sragen. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling jenuh*. *Sampling jenuh* adalah metode penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, dimana data tersebut diperoleh melalui kuesioner atau wawancara. Penyebaran kuesioner pada responden dilakukan dengan cara mendatangi dan membagi kuesioner secara langsung ke kantor DPRD Kabupaten Sragen.

Pengujian hipotesis menggunakan model analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$PD = \alpha + \beta_1 PDTA + \beta_2 KO + \beta_3 PDPTA \times KO + e$$

D. HASIL PENELITIAN

Hasil pengolahan data dengan bantuan computer program SPSS versi 16 didapatkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Persamaan Regresi	F	Adj. R ²	Hasil
PAPBD = -15,749 + 3,253 PDTA + 1,018 KO - 0,065 PDTA*KO (4,191)* (1,929) (-2,131)*	32,011 (0,000)	0,679	H ₁ diterima H ₂ ditolak H ₃ diterima

Sumber: Data Primer yang diolah

Keterangan: *= nilai t_{hitung} diterima pada taraf signifikan 5%

Berdasarkan persamaan Regresi Linier tersebut dapat diimplementasikan sebagai berikut:

$(\alpha) = -15,749$; hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya pengetahuan dewan tentang anggaran dan komitmen organisasi maka pengawasan dewan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah akan mengalami penurunan.

$(\beta_1) =$ sebesar 3,253 dengan parameter positif, hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan pada pengetahuan dewan tentang anggaran, maka tingkat pengawasan dewan pada anggaran dan pendapatan daerah akan semakin meningkat.

$(\beta_2) =$ adalah sebesar 1,018 dengan parameter positif, hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan pada komitmen organisasi, maka tingkat pengawasan dewan pada anggaran dan pendapatan daerah akan semakin meningkat.

$(\beta_3) =$ adalah sebesar - 0,065 dengan parameter negatif, hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan pada interaksi komitmen organisasi dan pengetahuan dewan tentang anggaran, maka tingkat pengawasan dewan pada anggaran dan pendapatan daerah akan mengalami penurunan.

E. PEMBAHASAN HIPOTESIS

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-15,749	13,395		-1,176	,246
PDTA	3,253	,776	1,575	4,191	,000
KO	1,018	,528	,831	1,929	,061
PDTA_KO	-,065	,031	-1,039	-2,131	,039

a. Dependent Variable: PAPBD

a. Pengujian Hipotesis Pertama (H_1)

Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4,191 dan p-value sebesar 0,000. Karena nilai $p < 0,05$, maka H_1 diterima artinya pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan dewan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

b. Pengujian Hipotesis Kedua (H_2)

Pengaruh komitmen organisasi terhadap pengawasan dewan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,929 dan p-value sebesar 0,061. Karena nilai $p > 0,05$, maka H_2 tidak diterima artinya komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan dewan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

c. Pengujian Hipotesis Ketiga (H_3)

Pengaruh komitmen organisasi terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan anggaran pendapatan dan

belanja modal (APBD). Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} untuk interaksi PDTA*KO sebesar -2,131 dan p-value sebesar 0,039. Karena $p < 0,05$, maka H_3 diterima pada taraf signifikansi 5%; artinya komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja modal (APBD).

F. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating pada DPRD Kabupaten Sragen dapat ditarik kesimpulan:

1. Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4,191 dan p-value sebesar 0,000. Karena nilai $p < 0,05$, maka H_1 diterima artinya pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan dewan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah DPRD Kabupaten Sragen.
2. Pengaruh komitmen organisasi terhadap pengawasan dewan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,929 dan p-value sebesar 0,061. Karena nilai $p > 0,05$, maka H_2 tidak diterima artinya komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan

terhadap pengawasan dewan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

3. Pengaruh komitmen organisasi terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan dewan pada keuangan daerah. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} untuk interaksi PDTA*KO sebesar -2,131 dan p-value sebesar 0,039. Karena $p < 0,05$, maka H_3 diterima pada taraf signifikansi 5%; artinya komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan dewan pada keuangan daerah DPRD Sragen.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat memberikan saran untuk penelitian berikutnya yaitu sebagai berikut: Diharapkan anggota DPRD Kabupaten Sragen lebih memperhatikan komitmen untuk masyarakat dan tidak terbatas pada intervensi dan tuntutan partai.

1. Bagi penelitian berikutnya diharapkan lebih memperluas sampel penelitian dan wilayah penelitian sehingga menyempurnakan penelitian ini dan penelitian sebelumnya.
2. Penelitian berikutnya disarankan menggunakan metode wawancara langsung kepada anggota dewan dan diharapkan anggota dewan dapat merespon pertanyaan peneliti sesuai kemampuan yang dimiliki, sehingga jawaban responden dapat dikontrol dan tidak terjadi bias atau salah persepsi dari responden terhadap instrument penelitian yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin,Johan. 2006. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparasi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan KeuanganDdaerah (Studi Di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yongyakarta)*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, volume 8, nomor 2, hal 180-198.
- Baswir, Revrison. 1999. *Akuntansi Pemerintah Indonesia, Edisi Tiga*. Yogyakarta: BPFE
- Basri, Yesi Mutia. 2008. *Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran pada Pengawasan Keuangan Daerah*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 8, Nomor 1, Hal 29-39.
- Bambang Sarjito, dan Osmand Muthaher. 2007. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating*. Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar 2007.
- Coryanata, Isma. 2007. *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Simposium nasional akuntansi X. Makasar.
- Djarwanto Ps. 1996. *Statistik Induktif*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Dewi, Indah Mustika. 2011. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan III. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan IV. Semarang: UNDIP.
- Mardiasmo. 2001. *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Andi, Jogjakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Pramita Devi Yulianto, dan Andriyani Lilik. *Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan*

Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Se-karisidenan Kedu). Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010.

Rosseptalia, Rima. 2006. *Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik, Skripsi.* Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian survey.* Jakarta: P3ES.

Sopannah dan Mardiasmo. 2003. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah.* Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya.

Suhartono, Ehrmann dan Mochammad Solichin. 2006. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi.* Simposium Nasional Akuntansi IX Padang.

Trianingsih, Sri. 2007. *Independensi Auditor dan komitmen Organisasi sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman good governance, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap kinerja Auditor.* Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.

Utomo, Hari. 2011. *Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi empiris pada DPRD kota/kabupaten dan DPRD provinsi Jawa Tengah).* Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.

Veronika, Amelia dan Komang Ayu Krisnadewi. 2008. *Pengaruh Partisipasi Penganggaran, Penekanan Anggaran, Komitmen Organisasi, dan Kompleksitas Tugas Terhadap Slack Anggaran Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Kabupaten Badung.* Universitas Udayana: Bali.

Winarna, Jaka, dan Sri Murni. 2006. *Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan keuangan Daerah.* Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.

Werimon, Simson. 2005. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris di Provinsi Papua).* Tesis. Program Pascasarjana Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro.